



Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Jelvan Andi Putra Lase¹, Jose Adrian Simbolon², Rio Manuel Matthew Siregar³, David Efendi⁴, Yulizar⁵

lasejelvan@gmail.com¹, josesimbolon2022@gmail.com², riomanuelmatthew836@gmail.com³, david@stiesia.ac.id⁴, baharudinyulizar@gmail.com⁵

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

⁵ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang

Article Info

Article history:

Received Januari 12th, 2024

Revised Januari 20th, 2024

Accepted Februari 26th, 2024

Kata Kunci:

Akuntansi AkruaL

Laporan Keuangan Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap SAP dan efektivitas penyajian informasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pencatatan aset dan penyusutan. Oleh karena itu, optimalisasi sistem informasi keuangan dan peningkatan kapasitas pegawai merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

ABSTARCT

This study aims to assess the implementation of accrual-based accounting in the preparation of the financial statements of BPMP North Sumatra Province in 2023, referencing Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the application of Government Accounting Standards (SAP). The financial statements include the Budget Realization Report (LRA), Balance Sheet, Operational Report (LO), Statement of Changes in Equity (LPE), and Notes to Financial Statements (CALK). This study uses a qualitative descriptive method with financial statement analysis to evaluate compliance with SAP and the effectiveness of financial information presentation. The results show that the implementation of accrual accounting has been successful, although there are still some challenges in asset recording and depreciation. Therefore, optimizing financial information systems and enhancing employee capacity are strategic steps to improve the quality of financial statements and the accountability of government financial management.



© 2024 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Nama Penulis, Jelvan Andi Putra Lase
Affiliation Universitas Negeri Medan
Email: penulis lasejelvan@gmail.com

Pendahuluan

Akuntansi berbasis akrual telah ditetapkan sebagai standar dalam pelaporan keuangan pemerintah sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan sistem akuntansi akrual di sektor publik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyediakan informasi keuangan yang lebih lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebelumnya, laporan keuangan pemerintah menggunakan basis kas, yang memiliki kekurangan dalam menggambarkan posisi keuangan secara menyeluruh, khususnya terkait pencatatan aset, kewajiban, dan biaya yang belum terealisasi dalam bentuk kas. BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai entitas akuntansi pemerintah, BPMP diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dengan cara yang transparan dan akuntabel, guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien.

Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistem akrual, yang mencakup beberapa elemen utama, seperti: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan diterapkannya sistem akrual, laporan keuangan BPMP diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi keuangan lembaga, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien oleh para pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, efektivitas sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan akuntansi akrual. Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai alat bantu dalam pelaporan keuangan diharapkan dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan transaksi keuangan. Namun, tantangan dalam integrasi data dan keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan akuntansi berbasis akrual telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem ini, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, seperti pemahaman sumber daya manusia (SDM), pencatatan aset tetap, dan efektivitas sistem informasi akuntansi yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BPMP, serta dampaknya terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam pengelolaan keuangan publik.

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Aspek yang dikaji meliputi struktur laporan keuangan, metode pencatatan transaksi, serta tantangan dan dampak implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini tidak mencakup aspek operasional atau manajemen keuangan secara keseluruhan, tetapi lebih menekankan pada sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan di BPMP.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi berbasis akrual adalah metode pencatatan yang mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, tanpa bergantung pada apakah kas sudah diterima atau dibayarkan. Sistem ini berbeda dengan akuntansi berbasis kas yang hanya mencatat transaksi saat terjadi arus kas masuk atau keluar. Dalam konteks pemerintahan, penerapan akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat tentang kondisi keuangan suatu entitas pemerintah, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Mahmudi, 2020).

Di Indonesia, penerapan akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual. Penerapan sistem ini memungkinkan laporan keuangan untuk mencakup seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara lebih menyeluruh, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Bastian, 2021).

Namun, implementasi akuntansi akrual dalam pemerintahan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep akrual, keterbatasan sistem informasi akuntansi yang mendukung pencatatan secara akurat, serta kendala dalam pencatatan aset tetap dan penyusutan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, meskipun sistem ini telah diterapkan secara luas di berbagai instansi pemerintahan, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pencatatan keuangan yang berbasis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Di Indonesia, SAP diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mewajibkan seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangannya. SAP ini mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah disusun menggunakan basis akrual, sebagaimana diatur dalam SAP.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang digunakan sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan oleh satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan. Meskipun laporan keuangan telah disusun berdasarkan SAP berbasis akrual, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti pencatatan aset tetap, penyusutan aset, serta pemahaman SDM terhadap konsep akrual. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi akrual dalam laporan keuangan BPMP.

Menurut penelitian sebelumnya (Mardiasmo, 2018), keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan serta optimalisasi sistem informasi

akuntansi menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan penerapan akuntansi akrual di sektor publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan BPMP. Metode ini diterapkan untuk menganalisis kebijakan akuntansi, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi akuntansi akrual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan studi literatur yang meliputi jurnal, buku, serta artikel terkait dengan penerapan akuntansi akrual di sektor publik.

Data dikumpulkan melalui pencarian dokumen dari portal jurnal akademik, situs web resmi pemerintah, serta publikasi institusi terpercaya. Proses seleksi dilakukan dengan memilih sumber yang memiliki kredibilitas tinggi serta relevansi dengan tujuan penelitian. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, di mana informasi dibandingkan dari berbagai referensi independen guna memastikan konsistensi data. Selain itu, dilakukan evaluasi kredibilitas terhadap setiap sumber yang digunakan, dengan memprioritaskan publikasi akademik dan dokumen resmi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual di sektor publik, meskipun tanpa melakukan survei atau wawancara langsung dengan pihak terkait.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis masing-masing laporan, dapat disimpulkan bahwa BPMP Pemeintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun laporan keuangannya pada tahun 2023 sesuai dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masih berbasis kas, sementara Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan CALK telah berbasis akrual sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk menilai sejauh mana laporan keuangan BPMP Pemprovsu telah sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual, berikut adalah analisis keterkaitan masing-masing laporan dengan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran dalam laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara masih disusun dengan menggunakan basis kas, sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja yang terjadi selama periode anggaran berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam laporan ini, BPMP mencatat pendapatan hibah, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta belanja lainnya yang telah direalisasikan sepanjang tahun anggaran yang berlangsung.

Namun, karena menggunakan basis kas LRA hanya mencerminkan transaksi yang sudah mempengaruhi arus kas, tanpa mempertimbangkan kewajiban yang masih harus dibayarkan atau pendapatan yang masih harus diterima. Oleh karena itu, agar memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif, LRA perlu diseimbangkan dengan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang berbasis akrual untuk menggambarkan kondisi keuangan yang lebih menyeluruh.

URAIAN	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	127.500.000	325.846.036	256	458.849.000
JUMLAH PENDAPATAN		127.500.000	325.846.036	256	458.849.000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	11.267.009.000	11.247.882.296	99,83	11.297.624.547
Belanja Barang	B.2.2	31.058.143.000	36.959.360.963	99,73	22.764.269.333
Belanja Modal	B.2.3	50.000.000	45.800.000	91,60	49.410.000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		48.375.152.000	48.253.043.259	99,75	34.111.303.880

Gambar 1. Tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 31 Desember 2022 dan 2023

2. Neraca

Neraca dalam laporan keuangan BPMP telah disusun dengan basis akrual, sehingga mencerminkan posisi keuangan BPMP pada akhir periode pelaporan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh BPMP. Pencatatan aset tetap, kas dan setara kas, piutang, serta kewajiban jangka pendek dan panjang telah dilakukan sesuai dengan prinsip akrual, yang mengakui transaksi berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul.

Meskipun laporan ini telah sesuai dengan sistem akuntansi berbasis akrual, masih terdapat tantangan dalam pencatatan aset tetap dan penyusutannya, karena tidak semua aset telah diperbarui sesuai dengan nilai wajar atau telah dilakukan perhitungan depresiasi secara berkala. Selain itu, pengakuan kewajiban seperti utang usaha dan beban yang masih harus dibayar juga perlu diperjelas agar sesuai dengan prinsip akrual, yang mencatat kewajiban pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya ketika pembayaran dilakukan.

URAIAN	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	1.934.103	-
Persediaan	C.15	37.092.650	40.725.400
Jumlah Aset Lancar		39.026.753	40.725.400
ASET TETAP			
Tanah	C.23	87.671.425.000	87.671.425.000
Peralatan dan Mesin	C.25	32.992.511.848	32.899.860.286
Gedung dan Bangunan	C.27	92.609.925.009	92.609.925.009
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	4.557.755.667	4.557.755.667
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(44.164.140.779)	(39.431.839.430)
Jumlah Aset Tetap		173.667.476.745	178.307.126.532
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.38	30.965.000	30.965.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	33.832.667	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(19.353.125)	-
Jumlah Aset Lainnya		45.444.542	30.965.000
JUMLAH ASET		173.751.948.040	178.378.816.932
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	111.516.964	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	37.394.167	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		148.911.131	
JUMLAH KEWAJIBAN		148.911.131	
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	173.603.036.909	178.378.816.932
JUMLAH EKUITAS		173.603.036.909	178.378.816.932
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		173.751.948.040	178.378.816.932

Gambar 2. Tabel Neraca 31 Desember 2023

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) BPMP disusun berdasarkan basis akrual, yang berarti pendapatan dan beban dicatat pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Laporan ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai aktivitas keuangan BPMP dengan

mencatat pendapatan dari hibah, pendapatan lainnya, serta beban operasional seperti belanja pegawai, penyusutan aset, dan beban operasional lainnya.

Karena LRA menggunakan basis kas dan LO menggunakan basis akrual, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara kedua laporan ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pencatatan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pencatatan penyusutan aset tetap, yang harus dilakukan secara akurat agar mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari aset yang dimiliki BPMP. Selain itu, pengakuan pendapatan berbasis akrual harus dipastikan sudah sesuai dengan waktu terjadinya hak atas pendapatan tersebut.

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	285.591.833	405.958.000
Jumlah Pendapatan		285.591.833	405.958.000
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	11.245.948.193	11.297.624.347
Beban Persediaan	D.4	918.632.750	823.391.050
Beban Barang dan Jasa	D.5	10.510.576.621	7.726.197.517
Beban Pemeliharaan	D.6	4.317.363.811	3.884.091.994
Beban Perjalanan Dinas	D.7	21.294.104.828	10.148.875.122
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	197.571.430
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	4.746.173.599	5.640.327.105
Jumlah Beban		53.032.799.802	39.718.078.785
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(52.747.207.969)	(39.312.120.785)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	2.860.072	52.891.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		2.860.072	52.891.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(52.744.347.933)	(39.259.229.785)
Pos Luar Biasa	D.15	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(52.744.347.933)	(39.259.229.785)

Gambar 3. Tabel Laporan Operasional 31 Desember 2023

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) BPMP disusun dengan basis akrual, yang menggambarkan perubahan ekuitas akibat surplus atau defisit dari Laporan Operasional (LO). LPE menyajikan saldo ekuitas awal, surplus/defisit tahun berjalan, serta penyesuaian lainnya yang mempengaruhi jumlah ekuitas BPMP. Karena laporan ini sangat bergantung pada hasil dari LO, maka jika terjadi kesalahan dalam pencatatan pendapatan atau beban dalam LO, hal tersebut akan berdampak langsung pada LPE.

Oleh karena itu, kesesuaian saldo ekuitas antara Neraca dan LPE harus diperiksa secara cermat untuk memastikan bahwa perubahan ekuitas telah dicatat dengan benar. Selain itu, perbedaan akibat pencatatan berbasis kas pada LRA dan berbasis akrual pada LO perlu dianalisis lebih lanjut agar tidak terjadi ketidaksesuaian antar laporan yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BPMP.

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	178.378.816.932	183.880.967.904
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(52.744.347.933)	(39.259.229.785)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	4.140.000	104.623.933
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	4.140.000	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	104.623.933
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		4.140.000	104.623.933
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	47.974.048.785	33.652.454.880
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(4.775.780.023)	(5.502.150.972)
EKUITAS AKHIR	E.6	173.603.036.909	178.378.816.932

Gambar 4. Tabel Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian penting dalam laporan keuangan BPMP yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian transaksi, serta informasi lainnya yang tidak dapat disajikan secara rinci dalam laporan utama. CALK menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan, metode akuntansi yang digunakan, serta penjelasan lebih lanjut mengenai setiap pos dalam laporan keuangan.

Salah satu aspek penting dalam CALK adalah pengungkapan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan BPMP, termasuk metode pencatatan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban. Oleh karena itu, CALK harus dapat mengungkapkan secara jelas bagaimana BPMP menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan bagaimana transisi dari basis kas ke basis akrual diterapkan dalam pencatatan keuangan. Jika ada penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku atau kendala dalam implementasi akrual, informasi ini juga harus diungkapkan dalam CALK agar transparansi laporan keuangan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah mengadopsi prinsip akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki, seperti penyesuaian antara LRA yang berbasis kas dengan laporan lain yang berbasis akrual, pencatatan aset tetap dan penyusutannya, serta pengakuan pendapatan dan kewajiban berbasis akrual. Dengan perbaikan di aspek-aspek tersebut, laporan keuangan BPMP dapat lebih akurat dalam mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) telah mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.

Secara umum, laporan keuangan BPMP telah menunjukkan peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat dibandingkan dengan sistem berbasis kas yang sebelumnya digunakan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti pencatatan aset tetap dan penyusutan yang belum sepenuhnya optimal, inkonsistensi antara laporan berbasis kas dan akrual, serta keterbatasan dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan. Oleh karena itu, untuk memastikan implementasi yang lebih baik di masa

mendatang, BPMP perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami akuntansi berbasis akrual, mengoptimalkan sistem informasi keuangan, serta memperbaiki pencatatan aset dan kewajiban. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kualitas laporan keuangan BPMP semakin meningkat dan dapat berkontribusi dalam pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2021). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2020). *Akuntansi sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Publisher.
- Evaluasi Efektivitas Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Indonesia. (n.d.). <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/evaluasi-efektivitas-penggunaan-standar-akuntansi-pemerintah-berbasis-akrual-di-indonesia> 7af86658/detail
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23* (Cetakan Kedelapan). Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi Keempat). Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Kppn, R. (2024, September 22). Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual untuk Meningkatkan Akurasi Laporan Keuangan. <https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/189-berita/3750-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual-untuk-meningkatkan-akurasi-laporan-keuangan.html>
- Kusbianto. (2015, April 27). kusbianto. <https://kalbar.bpk.go.id/standar-akuntansi-pemerintahan-sap-berbasis-akrual/>
- Mulyadi. (2018). *Sistem terpadu pengelolaan kinerja personel berbasis balanced scorecard* (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Purnamasari, N. I., Antong, A., & Kasran, M. (2020). EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA KANTOR BPKAD KABUPATEN LUWU. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2). <https://doi.org/10.35906/ja001.v6i2.557>
- Reu, N. F. M. (2024). Evaluasi penerapan standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan operasional pada Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. *Akubis Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 41–58. <https://doi.org/10.37832/akubis.v10i2.67>
- Sari, A., & Kusmilawaty, K. (2023). Implementasi standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas (Implementation of Accrual-Based Government accounting standards to realize quality financial reports). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1). <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1185>
- Satrio, M. D., 1, Yuhertiana, I., Hamzah, A., Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, & Universitas Trunodjoyo, Bangkalan, Madura. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. In *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 18, Issue 1, pp. 59–70). <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>
- Suwardjono. (2013). *Teori akuntansi: Perekayasa pelaporan keuangan* (Edisi Ketiga). BPFE.